Wapres: Pers Garda Depan Informasikan Pentingnya Vaksin COVID-19

ANTARA/Sekretariat Wakil Presiden

Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin, mengatakan pekerja media menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi akurat terkait vaksin COVID-19 dan program vaksinasinya kepada masyarakat secara luas.

Ia berharap para pekerja media dapat memberikan informasi data dan penjelasan ilmiah secara akurat terkait pentingnya vaksin COVID-19, sehingga kesadaran masyarakat terhadap vaksinasi meningkat.

"Insan pers merupakan garda terdepan dalam menginformasikan program vaksinasi kepada masyarakat secara luas. Dalam menyuguhkan informasi mengenai vaksin COVID-19, insan pers perlu menyertakan data pendukung dan penjelasan ilmiah dari para pakar," kata dia, saat memberikan pembekalan kepada peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP) secara virtual dari Jakarta, Senin (14/12).

Ia meminta dukungan dari para pekerja media untuk menggalakkan program Pemerintah 'Vaksinasi untuk Negeri' melalui pemberitaan-pemberitaan yang sesuai. "Saya ingin meminta dukungan para insan pers untuk turut mendukung kelancaran diseminasi informasi vaksin yang telah kita nantikan bersama," kata dia.

Dalam menyampaikan informasi vaksin itu, dia mengingatkan pentingnya pendekatan melalui media sosial sebagai sarana yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia dalam mengakses informasi.

Merujuk pada survei Kementerian Komunikasi dan Informatika, dia mengatakan, media sosial menjadi sarana utama bagi masyarakat Indonesia dalam mengakses informasi, disusul televisi, situs berita daring, situs resmi pemerintah, media cetak dan radio.

"Tingginya popularitas media sosial, sebagai media penyebaran informasi, perlu diperhatikan oleh para insan pers; sehingga dapat terus menghadirkan informasi yang akurat secara inovatif dan kreatif melalui media sosial," katanya.

Wapres juga mengapresiasi para pekerja media yang tergabung dalam program FJPP karena telah ikut mendukung upaya Pemerintah dalam menyosialisasikan kampanye perubahan perilaku hidup sehat di masa pandemi COVID-19.

Ia juga berpesan kepada para pekerja media untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalisme, khususnya di daerah berisiko tinggi terinfeksi COVID-19.

"Semoga program ini dapat membuahkan hasil nyata bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Saya berpesan, tetaplah menjaga diri selama bertugas, jangan kendor dengan protokol kesehatan, terutama saat melakukan peliputan ke lokasi atau daerah yang berisiko tinggi," ujarnya. **(ANTARA)**

ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

Petugas memberhentikan pengguna jalan yang tidak mengenakan masker dalam razia untuk menegakkan protokol kesehatan di Yogyakarta.

Satpol PP DIY akan Bubarkan Setiap Kerumunan saat Malam Tahun Baru

YOGYAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan membubarkan seluruh kegiatan masyarakat yang memunculkan kerumunan saat malam perayaan Tahun Baru 2021.

"Sepanjang menimbulkan kerumunan dilarang," kata Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad di Yogyakarta, Senin (14/12).

Ia mengatakan pemerintah tidak melarang perayaan malam tahun baru, hanya mewajibkan penyelenggara acara mengajukan permohonan izin dan menerapkan protokol kesehatan.

Mengenai pesta kembang api yang setiap pergantian tahun banyak dilakukan oleh warga maupun wisatawan di pusat Kota Yogyakarta, Noviar memastikan akan membubarkan jika pesta kembang api itu memunculkan kerumunan.

Tidak hanya di pusat Kota Yogyakarta atau kawasan destinasi wisata, menurut dia, pesta kembang api yang dilakukan di desa-desa juga akan ditindak satuan gugus tugas desa atau kecamatan yang akan berpatroli memantau kerumunan massa. "Kalau pesta kembang apinya menimbulkan kerumunan ya tidak boleh," kata dia.

Oleh sebab itu Noviar mengimbau masyarakat di masa pandemi ini cukup merayakan malam pergantian tahun di rumah masing-masing. Ia mengatakan Satpol PP DIY akan mengerahkan 459 petugas untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan selama libur panjang Natal dan Tahun Baru. **(ANTARA)**

Menko Perekonomian: Izin Vaksin, BPOM Tunggu Data Sinovac dan Uji Klinis

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih menunggu data dari Sinovac serta hasil uji klinis dari Bandung dan Brazil untuk dapat memberikan izin terhadap 1,2 juta vaksin COVID-19 yang telah tiba di Indonesia.

"Kita harap emergency user authorization dapat segera diterbitkan BPOM karena menunggu data dari Sinovac dan menunggu hasil dari clinical trial di Bandung dan Brazil yang rencananya selesai pada 15 Desember," katanya dalam acara Bisnis Indonesia Award 2020 di Jakarta, Senin (14/12).

Airlangga menyatakan keberadaan 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 ini diharapkan mampu menjadi game changer untuk menahan penyebaran kasus pandemi sekaligus mendorong momentum pemulihan ekonomi. "Indonesia terus mendorong momentum pemulihan ekonomi dengan menjaga keseimbangan antara penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi," katanya.

ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Tak hanya itu, Airlangga menuturkan adanya vaksin ini dipercaya akan dapat meningkatkan kepercayaan publik untuk melakukan berbagai kegiatan sehingga pemulihan ekonomi nasional secara penuh segera terjadi. Hal tersebut sejalan dengan tingkat kesembuhan di Indonesia yang mencapai 82,21 persen, lebih tinggi dari rata-rata kesembuhan global.

Menurutnya, tingkat kesembuhan di Indonesia yang melebihi rata-rata global menunjukkan penanganan pandemi di dalam negeri sudah sesuai koridor. Terlebih lagi, ia memastikan keseimbangan upaya 3T yaitu testing, tracing dan treatment sekaligus 3M yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan akan mampu menciptakan pemulihan penuh pada tahun depan.

"Protokol kesehatan yang terus kita jaga, pemerintah percaya bahwa 2021 ini menjadi tahun pemulihan. Tahun yang memberikan peluang kepada ekonomi nasional agar ekonomi nasional kita bisa bergerak," tegasnya.

Oleh sebab itu, Airlangga mengatakan selain 1,2 juta dosis vaksin yang telah tiba nantinya Indonesia juga akan menerima 1,8 juta vaksin dalam bentuk jadi pada tahun depan. "Diikuti dengan dalam bentuk bahan baku pada Desember akan ada 15 juta yang diharapkan bisa diproduksi Bio Farma," katanya. **(ANTARA)**

Jateng Siapkan Tenaga Kesehatan Tambahan untuk Tempat Isolasi Terpusat

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan penambahan jumlah tenaga kesehatan yang ditugaskan di dua tempat isolasi terpusat COVID-19, yakni di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali dan kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jateng, Kota Semarang.

"Dua tempat isolasi terpusat sudah mulai aktif, nakesnya sekarang kita siapkan tambahan-tambahannya, kita kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, IDI, dan perawat, kita tambah terus, itu kan butuh pelatihan ya dan emang butuh banyak, jadi butuh partisipasi dari warga," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Senin (14/12).

Terkait dengan rencana itu, Pemprov Jateng bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Pemprov Jateng juga menambah fasilitas isolasi dan ICU yang ada di rumah sakit, baik tempat tidur ruang isolasi maupun tempat tidur di ruang ICU. "Sehingga, kalau kemudian mereka sudah parah di rumah sakit itu, rumah sakitnya lebih mampu, tapi seandainya mereka tanpa gejala, kita pusatkan saja di situ, sehingga penanganannya akan lebih gampang," ujarnya.

Selain itu, Ganjar juga mendorong beberapa aset milik Pemprov Jateng hingga hotel dapat dioptimalkan menjadi tempat isolasi terpusat lainnya. "Nah tadi ada penawaran, umpama kasus di Jabar karena banyak tempat diklat dari TNI tadi Pak KASAD juga menawarkan itu, maka di tempat ini juga kita bisa buat 'back up' itu," katanya.

Asrama Haji Donohudan mulai digunakan untuk tempat isolasi terpusat dengan kapasitas 874 tempat tidur dan saat ini terpakai 23 tempat tidur, sedangkan di kantor BPSDMD Jateng berkapasitas 400-600 tempat tidur dan saat ini baru ditempati 58 orang. **(ANTARA)**

LLDIKTI: Sebagian Besar Kampus di DIY Tetap Terapkan Kuliah Daring

ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/aww/am

Dosen menyampaikan materi perkuliahan secara daring.

YOGYAKARTA - Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah V Yogyakarta Prof Didi Achjari memperkirakan sebagian besar kampus di Daerah Istimewa Yogyakarta masih akan menerapkan perkuliahan secara daring pada semester genap 2020/2021 atau Januari 2021.

"Dugaan kami sebagian besar kampus di DIY akan menggunakan daring dan hybrid (campuran luring dan daring). Kalau luring dugaan saya masih minoritas," kata Didi Achjari saat dihubungi di Yogyakarta, Senin (14/12).

Menurut Didi, meski sudah ada Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 yang memperbolehkan dimulainya perkuliahan tatap muka pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, kampus dipersilahkan menerapkan pola perkuliahan sesuai kemampuan masing-masing. "Tidak ada kewajiban menerapkan konsep yang sama karena kemampuan dan kesiapan kampus berbeda-beda," kata dia.

Menurut dia, perkuliahan dengan tatap muka secara penuh akan membutuhkan banyak tambahan ruangan karena ada pembatasan kuota mahasiswa untuk menerapkan jaga jarak fisik. "Perlu kita cermati bersama bahwa tidak semua kampus di DIY yang secara sarana dan prasarana siap menjalankan aturan yang digariskan Dirjen Dikti," kata dia.

Oleh sebab itu, Didi memperkirakan untuk awal 2021, baru perguruan tinggi negeri (PTN) yang siap memulai perkuliahan tatap muka meski tetap dengan sejumlah catatan, di antaranya memprioritaskan mahasiswa semester awal 2020 dan mahasiswa yang masa studinya hampir habis. "Sejauh yang kami tahu seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) yang akan mencoba tatap muka dengan mengikuti arahan Dirjen Dikti," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X berencana menjadikan kegiatan perkuliahan di kampus sebagai acuan untuk pembelajaran tatap muka di sekolah. "Kita lihat risikonya bagaimana. Kita lihat dulu beberapa kampus kan sudah masuk tatap muka," kata Sultan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan apabila pembelajaran tatap muka di kampus berjalan dengan baik dan aman, kemungkinan akan diikuti pendidikan menengah di DIY.
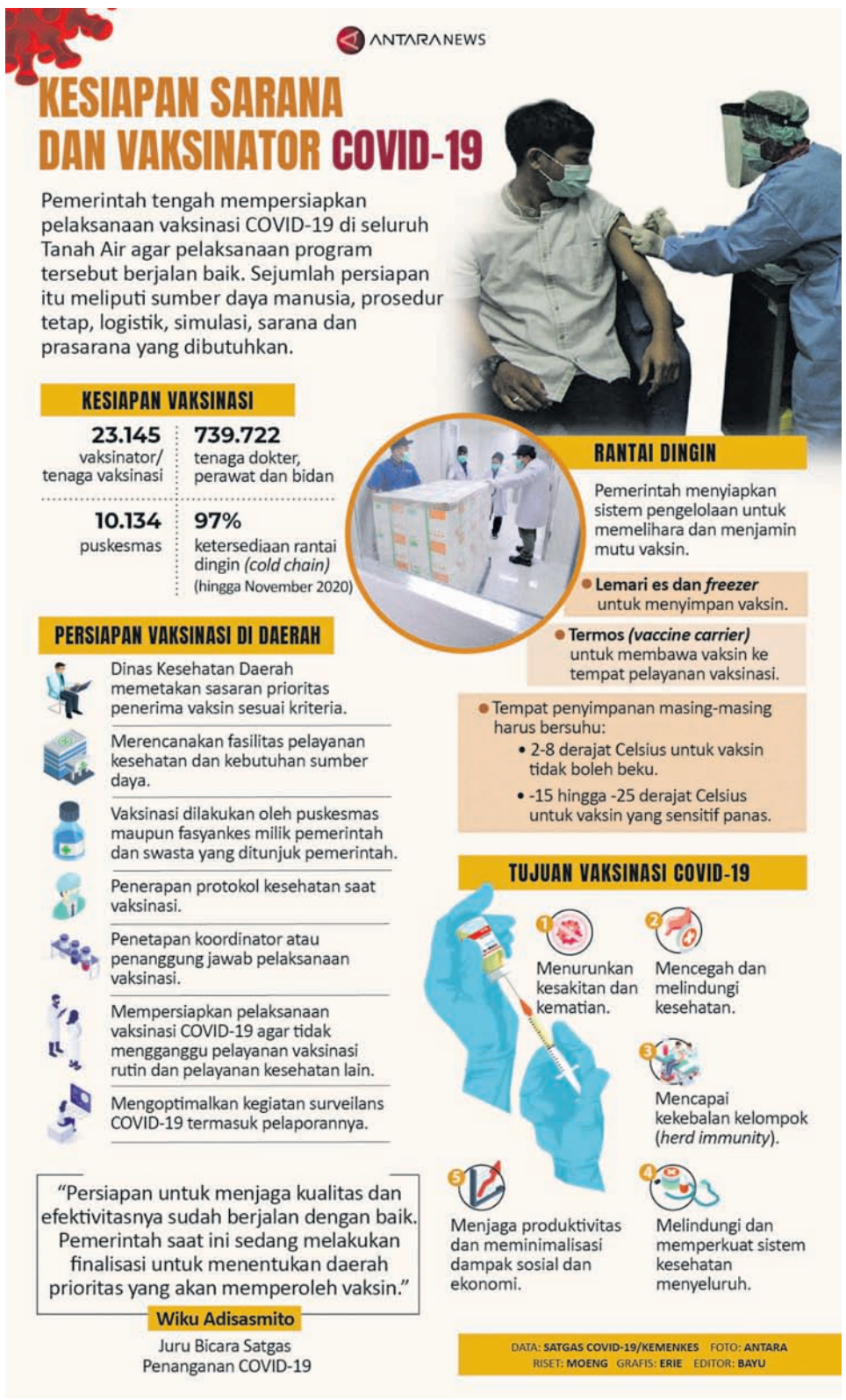
Meski demikian, Pemda DIY akan melihat untung rugi pembelajaran tatap muka dengan lebih dahulu mengevaluasi kesiapan masing-masing sekolah, perilaku anak, perilaku keluarga terhadap protokol kesehatan. **(ANTARA)**